

DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

SAATNYA PERLINDUNGAN
UNTUK AKTIVITAS DI
MEDIA SOSIAL

**PENGUMPULAN
DATA UNTUK
IKP 2021 DI AMBON**

MENINGKATKAN
KUALITAS KEMERDEKAAN
PERS DI INDONESIA

SINERGI INSAN PERS DENGAN SATGAS COVID-19 UNTUK PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT



SINERGI INSAN PERS DENGAN SATGAS COVID-19 UNTUK PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan sinergi insan pers dengan Satgas COVID-19 bertujuan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat menimbulkan perubahan perilaku. Dengan demikian insan pers dapat memainkan peran penting dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

“Kita semua insan pers dan BNPB bisa kerjasama dan sinergi dalam rangka untuk menangani urusan COVID-19. Kedua, urusan COVID-19 belum selesai, bahkan ada varian baru ini memberikan tantangan. Sehingga kawan jurnalis tidak cukup hanya sekedar menyampaikan informasi, namun juga *knowledge* (pengetahuan) sehingga

“Informasi harus bisa menjadi kesadaran publik. Ilmu ini bukan yang hanya untuk diketahui namun juga dilaksanakan ini adalah wilayah kesadaran. Dampak turunan COVID-19 bukan hanya berimbas pada kesehatan namun juga pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya,”

—
M. NUH
Ketua Dewan Pers

masyarakat bisa melakukan perubahan perilaku,” ujar M. Nuh dalam pembukaan acara dimulainya gelombang kedua *Fellowship* Jurnalisme Perubahan Perilaku ini secara daring hari Senin (10/5)

Menurut Ketua Dewan Pers, informasi harus memberikan penyadaran sehingga butuh trik untuk menyampaikan informasi agar masyarakat sadar bahwa yang mereka akan lakukan berdampak terhadap perubahan perilaku.

“Informasi harus bisa menjadi kesadaran publik. Ilmu ini bukan yang hanya untuk diketahui namun juga dilaksanakan ini adalah wilayah kesadaran. Dampak turunan COVID-19 bukan hanya berimbas pada kesehatan namun juga pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya,” tegasnya.

Dalam sambutan dimulainya gelombang kedua program *fellowship* jurnalisme perubahan perilaku ini, Mohammad Nuh juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kepala BNPB sekaligus ketua satuan tugas penanganan COVID-19 yang berulang tahun pada hari Senin 10 Mei 2021.

UPAYA BERSAMA

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan, "Acara ini sangat penting sekali untuk melakukan sebuah peningkatan dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan insan pers dalam rangka upaya bersama dalam perang menghadapi pandemi COVID-19," ungkap Doni Monardo dalam sambutannya.

Doni menegaskan bahwa keberhasilan dari penyampaian komunikasi adalah 63% sangat dipengaruhi dari media khususnya media arus utama maupun media sosial. Seluruh komponen bangsa perlu bekerjasama untuk mengingatkan semua pihak agar kasus penyebaran COVID-19 bisa terkendali.

"Kita lihat bersama bahwa di India mengalami peningkatan kasus yang sangat tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena kelalaian dan melonggarkan protokol kesehatan," kata Doni.

"Peserta *fellowship* jurnalisme perubahan perilaku harus mampu membangkitkan kesadaran warga bahwa membatasi mobilitas ini adalah pilihan terbaik tidak ada pilihan lain. Biar saja kita dianggap cerewet seperti nenek-nenek daripada nanti menyesal karena ada berderet korban," pungkas Doni bersemangat.

Doni menceritakan dalam kasus penyebaran COVID-19 di salah satu Kelurahan di Jambi ada wilayah yang penduduknya 50% terjangkit virus corona. Mereka melakukan upaya inisiatif dengan melakukan *lockdown* secara mikro. Adanya dan bisa menjadi contoh.

Menurut Doni, ada seorang fig-



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Press Release

Dewan Pers Apresiasi Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku

Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) dilanjutkan kembali. Senin 10 Mei 2021, pembukaan FJPP periode 2 dilakukan secara virtual oleh Ketua Satgas Penanganan Pandemi Covid-19, Doni Monardo dan Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH. Sebanyak 3030 wartawan dari seluruh Indonesia akan mengikuti program ini selama 8 bulan, antara Mei hingga Desember 2021. Sebagai fellow, para jurnalis peserta akan secara rutin membuat berita yang mengkampanyekan pentingnya perubahan perilaku yang kondusif untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Program FJPP merupakan kerja-sama antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers, dan sebelumnya juga telah berlangsung pada periode Oktober-Desember 2020.

Dewan Pers memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi covid-19 tetap relevan, bahkan semakin relevan. Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19 melalui sarana komunikasi dan informasi massa. FJPP ini momentum bersejarah yang jarang terjadi. Pemerintah berkomitmen membantu para wartawan yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Pers sebaliknya membantu pemerintah mengarusutamakan perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Namun, kedua pihak menyadari FJPP tidak dimaksudkan untuk mengurangi sikap kritis pers terhadap pemerintah. Apresiasi yang tinggi dalam hal ini perlu kami berikan kepada pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19.

Para wartawan peserta FJPP secara berkelanjutan akan memberitakan pandemi Covid-19 dengan menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam masyarakat: menggunakan masker secara benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga asupan gizi dan berolahraga secara cukup untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19. Atas kontribusi tersebut, para peserta akan mendapatkan remunerasi setiap bulan yang dialokasikan dari APBN. Dewan Pers menjamin remunerasi ini tidak menghalangi pers untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 menunjukkan para peserta masih tetap bersikap kritis terhadap unsur-unsur pemerintahan lain yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Wartawan tetap bisa kritis, bahkan diharapkan tetap bersikap kritis dalam memberitakan isu-isu protokol kesehatan dan perubahan perilaku.

FJPP merupakan bagian dari insentif ekonomi yang diberikan negara kepada sektor media. Pada masa awal pandemi Covid-19, unsur asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan mengajukan beberapa opsi insentif ekonomi kepada pemerintah. Dewan Pers memfasilitasi proses tersebut. Untuk para individu wartawan, insentif tersebut diwujudkan dalam program FJPP. Insentif ekonomi untuk wartawan tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung, melainkan secara programatik dalam fellowship penulisan karya jurnalistik. Ini lebih mendidik dan profesional. Program FJPP melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai latar-belakang media untuk menjadi editor. Mereka bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan.

Jakarta, 11 Mei 2021
Dewan Pers



Mohammad NUH
Ketua DEWANPERS

Narahubung : Agus Sudibyo / +62 811-865-062

ur bernama Pak Ali yang menjadi motor penggerak masyarakat yang dipatuhi masyarakat sana. "Kita membutuhkan sosok seperti bapak Ali di daerah-daerah lain. Disiplin tidaklah berarti jika hanya sendiri, karena disiplin haruslah

secara bersama atau komunal," jelasnya.

Pemerintah telah bekerja keras untuk menghadirkan vaksin namun vaksin bukanlah segalanya. Meskipun telah divaksin kita mesti patuh protokol kesehatan. "Kerja keras kita saat ini akan me-



nentukan masa depan bangsa, kita tidak ingin jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi di masa mendatang,” tegas Doni.

“Literasi mengenai COVID-19 harus selalu disampaikan kepada masyarakat. Saya yakin dengan program FJPP ini bangsa kita akan semakin baik dalam mengendalikan dampak COVID-19,” pungkasnya.

PERKEMBANGAN COVID-19

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan paparan data terkait kondisi terkini COVID-19 oleh Dokter Dewi Nur Aisyah dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 yang menjelaskan tren kenaikan terjadi pada wilayah diluar Pulau Jawa yang kian meningkat. Sementara di Pulau Jawa sendiri sudah mulai terkendali.

Peningkatan jumlah pasien terjangkit virus COVID-19 pada bulan Mei 2021 sebenarnya masih diambang batas aman dari standar yang disampaikan organisasi kesehatan dunia. Namun, jika kondisi ini tidak terus dikawal maka bisa

▲ PARA JURNALIS LIPUTAN DENGAN PROKES, SAAT MELIPUT VAKSIN UNTUK PEKERJA MEDIA.
(FOTO: DEWAN PERS)

“Kerja keras kita saat ini akan menentukan masa depan bangsa, kita tidak ingin jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi di masa mendatang,”

DONI MONARDO
Kepala BNPB sekaligus ketua satuan tugas penanganan COVID-19

kemungkinan berdampak buruk kedepannya.

“Kita tahu bahwa penyakit ini begitu mudah menyebar dan menular dari seseorang ke orang lainnya, sehingga pengendalian dan strategi penting sekali untuk diterapkan bagaimana caranya kita memutus rantai penularan ini,” ujarnya.

Diakhir webinar juga disampaikan hal teknis terkait program berjalannya FJPP yang memberikan insentif bagi jurnalis peserta yang mengikuti syarat dan ketentuan. Diantaranya yakni membuat 11 berita *hard news* dan 1 berita *feature* yang diunggah ke laman *ubahlaku.id* jurnalisisme perubahan perilaku. Peserta yang bisa memenuhi target akan mendapatkan uang transportasi Rp.1,6 juta per bulan selama 8 bulan Mei-Desember 2021.

TIGA AKTIVITAS

Sementara itu, Hery Trianto selaku Ketua Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berperan sebagai penanggung jawab program

Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) menjelaskan bahwa ada tiga aktivitas utama yang dilakukan.

Aktivitas tersebut meliputi berbagai hal yang pertama yakni berita perubahan perilaku yang mengajak wartawan menggalakkan pemberitaan pers berperspektif perubahan perilaku guna pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, memperkaya konten berita media yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

Ketiga yaitu agen perubahan perilaku yang melibatkan wartawan sebagai agen perubahan perilaku melalui peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi edukasi publik dalam menghadapi bencana nasional.

“Program ini melibatkan semua elemen pers bersama tim satgas penanganan COVID-19 dari kita, oleh kita dan untuk kita,” ujar Hery.

Jurnalis yang ikut serta dalam program ini merupakan hasil seleksi dari program sebelumnya yang melibatkan ribuan jurnalis pendaftar yang diseleksi menjadi 5000 jurnalis dari seluruh penjuru daerah.

Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam program ini yakni, pertama menjadikan jurnalis sebagai garda depan perubahan perilaku masyarakat guna mencegah penularan COVID-19. Kedua, menciptakan pemberitaan yang mentaati kode etik jurnalistik tentang perkembangan pandemi. Ketiga, turut memberikan solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan.

Menurut Hery, syarat dan ketentuan dalam mengikuti program ini ada-

“Program ini menjadi sejarah fellowship terbesar sepanjang sejarah pers di Indonesia karena melibatkan ribuan jurnalis.”

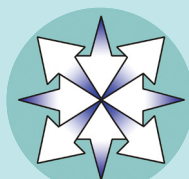
lah: 1) Memiliki sertifikat kompetensi wartawan minimal tingkat muda. 2) Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan media yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. 3) Mendapatkan rekomendasi dari asosiasi jurnalis/perusahaan pers konstituen Dewan Pers.

Sejak dimulainya program FJPP pada September 2020 lalu, telah terdaftar lebih dari 7000 pendaftar yang kemudian lolos dari seleksi berjumlah 5000 jurnalis dari berbagai daerah. Sehingga pada Oktober 2020 berjalannya program diikuti oleh 34 provinsi hingga berakhir pada Desember 2020.

“Program ini menjadi sejarah *fellowship* terbesar sepanjang sejarah pers di Indonesia karena melibatkan ribuan jurnalis,” imbuh Hery yang mengenakan baju putih berompi hijau berlogo BNPB. Pada fellowship pertama produktivitas tertinggi berita adalah dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah diikuti 30 provinsi lainnya.

Menurut Hery, terdapat 172.027 berita yang disiarkan dari beberapa *platform* yakni media cetak 47.334 berita, media siber 77.987 berita, media televisi (video) 42.049 berita, media radio 4.657 berita, serta website media ubahlaku 77 berita.

Dalam FJPP Gelombang kedua ini telah lolos 3030 peserta yang diseleksi oleh tim dari Dewan Pers, Satgas COVID-19 dan perwakilan konstituen Dewan Pers yang diketuai oleh Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Agus Sudibyo. Tim ini terdiri dari Apreyvita Dyah Wulansari, Imam Wahyudi, M. Nasir perwakilan dari PWI, Heru Hendratmoko dari Aliansi Jurnalis Independen dan Petty S Fatimah dari Forum Pemred. ● **(Imam Suwandi)**



DEWANPERS

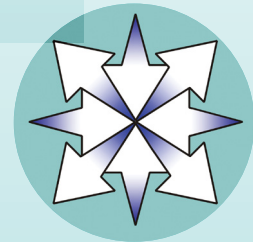
Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Sudarwanto BR

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

● dewanpers ● @officialdewanpers ● Dewan Pers ● Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



DEWANPERS

Assalamualaikum wr wb

Saya Mohammad Ketua Dewan Pers ingin bersama-sama kita semua untuk menikmati indahnya itu Idul Fitri.

Oleh karena itu saya ingin menyampaikan selamat kepada kita semua untuk berhari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Setelah 1 bulan kita bisa menikmati indahnya ramadhan, bukan sekadar melaksanakan ibadah ramadhan tetapi menikmati, karena kalau kita bisa menikmati, apa yang sangat berat itu menjadi sangat ringan.

Sehingga apa yang kita lakukan selama Ramadhan kemarin bisa menjadi modal yang sangat luar biasa untuk perjuangan setelah ramadhan itu.

Ya itu apa ? nilai-nilai ketakwaan termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai belajar menyampaikan sesuatu dengan benar dan baik.

Pers haruslah menjadi sumber modalitas kebahagiaan dan kebenaran tanpa itu saya kira pers justru akan menjadikan kita semua bodoh.

Pembodohan bukan pencerdasan kalau tidak didasarkan atas fakta realitas dan kebenaran itu.

Saatnya ayo sama-sama kita bangun dunia media dunia pers kita yang tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik tapi substansinya adalah mencerdaskan.

Karena apa ? karena yang disampaikan selalu ada dasar yaitu data dan faktanya.

Dan kemampuan para jurnalis untuk mengolahnya catatan itu menjadi informasi dan munculnya informasi menjadi pengetahuan dan dari situlah kita akan bisa mengajarkan tentang wisdom kebijakan.

Sehingga dengan demikian kehadiran kita semua justru akan mencerdaskan bukan sebaliknya.

Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan membangun semangat baru. Semangat pers yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

wassalamualaikum wr wb



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: (021) 3452030
Website: <http://www.dewanpers.org> E-mail: dewanpers@cbn.net.id

Jakarta, 28 April 2021

Nomor : 01/DP/K/IV/2021
Perihal : Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H

Kepada Yth.
1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia
di- Indonesia

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13-14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers.

Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah sebagai berikut:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
4. Perusahaan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI),
5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),
6. Asosiasi Televisi Swata Indonesia (ATVSI),
7. Serikat Perusahaan Pers (SPS),
8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
10. Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Dewan Pers sekali lagi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, bingkisan, atau sumbangan terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 H dari pihak-pihak yang mengaku sebagai konstituen Dewan Pers. Hal yang sama Dewan Pers tidak mengijinkan Konstituen Dewan Pers untuk melakukan hal yang sama.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi lebih lanjut melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

Demikian, imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional.

Dewan Pers,



SAATNYA PERLINDUNGAN UNTUK AKTIVITAS DI MEDIA SOSIAL

Dewan Pers memandang perlunya disiapkan sejumlah panduan untuk perlindungan bagi para aktivis media sosial dan konten kreator yang produknya mirip jurnalistik. Hal itu disebabkan sampai saat ini UU Pers No 40 belum menjangkau terhadap produk mirip jurnalistik di media sosial seperti YouTube.

Demikian salah satu isu yang muncul dalam Webinar Media Lab episode ketiga dengan tema Fenomena Baru Dunia Digital dimata UU Pers & Kode Etik Jurnalistik pada 27 Mei 2021 pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Kondisi ini muncul karena era sekarang semua orang dengan mudah bisa berperan seperti wartawan. Namun tidak semuanya bisa dilindungi oleh UU Pers karena terdapat persyaratan khusus yang tercantum dalam undang-undang seperti lembaga pers ini perlu berbadan hukum. Berbagai kegiatan konten kreator ini karena semakin berkembang di platform digital rawan terjerat hukum non pers.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menyampaikan bahwa praktik jurnalistik di ranah media sosial semakin berkembang. Hal ini terlihat dari adanya praktisi media yang kini beralih platform ke media sosial. Selain juga

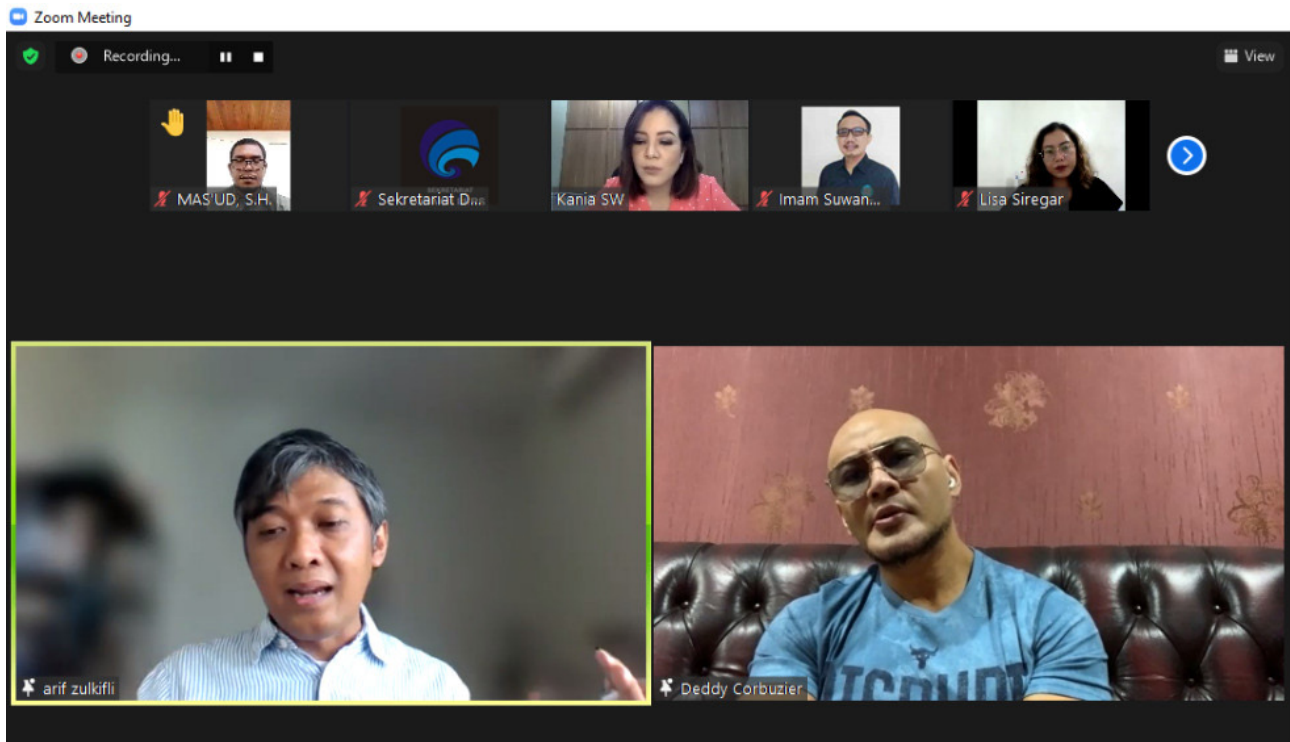
banyak figur ternama (artis) yang juga memproduksi kontennya melalui akun kanal video YouTube.

“Ada satu yang membatasi ruang lingkup pers yakni berbadan hukum, berbeda dengan konten kreator yang tidak punya badan hukum sehingga tidak bisa dilindungi oleh UU Pers,” ujar Arif.

Pers tidak boleh dipenjara gara-gara membuat berita karena pers dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999 karena menjalankan tugas jurnalistik. Berbeda dengan konten kreator yang membuat konten untuk media sosial dengan praktik mirip jurnalistik. “Beda dengan media sosial yang terafiliasi dengan media mainstream misalnya Kompas memiliki media sosial di *multi platform*, mereka mengikuti badan hukum medianya dan hanya sebagai kepanjangan tangan dari media utamanya, sedangkan YouTuber tidak berbadan hukum dan dilakukan secara personal,” ungkap Arif Zulkifli.

PERLU PERLINDUNGAN

Menanggapi paparan sebelumnya, Deddy Corbuzier juga berharap dirinya dan juga para konten kreator bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap apa yang telah diproduksinya. Dirinya merasa apa yang dipro-



 MEDIA LAB ARIF ZULKIFLI DAN DEDDY COBUZIER. (FOTO:DEWAN PERS)

duksinya menjadi bagian dari produk jurnalistik namun disajikan melalui saluran sosial media.

“Media mainstream memilih berita, tidak semua hal disiarkan oleh media mainstream misalnya terkait prestasinya dan sebagainya. Media memilih berita yang dianggap menarik dan berpotensi mendapatkan share dan rating yang tinggi,” ujar Master Magician Deddy.

Deddy Corbuzier juga menanyakan tentang media mainstream yang mengutip konten yang diproduksinya untuk disiarkan media. Media utama seringkali mengutip dari media sosial tanpa konfirmasi dari narasumber maupun pemilik akun. Dedy sangat kritis menanggapi kasus hukum pers di Indonesia.

“Kenapa kasus Anji (penyanyi/naravlog) yang mewawancarai Hadi Pranoto yang mengklaim menemu-

kan antibodi COVID-19 malah disebarkan ?, padahal narasumber yang sama juga pernah disiarkan media arus utama,” ujar Deddy makin penasaran dengan kasus hukum pers.

Pemilik akun YouTube Deddy Corbuzier yang sudah memiliki 14,6 juta *subscriber* juga mempunyai kekhawatiran dalam menghadapi masalah hukum, Deddy berharap bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Dewan Pers untuk konten yang digarapnya. “Saya tahu sedikit tentang jurnalistik, yang jadi masalah akan banyak orang yang tidak mengerti jurnalistik akan menceritakan banyak hal, mereka ini perlu perlindungan hukum” ujar Deddy Corbuzier.

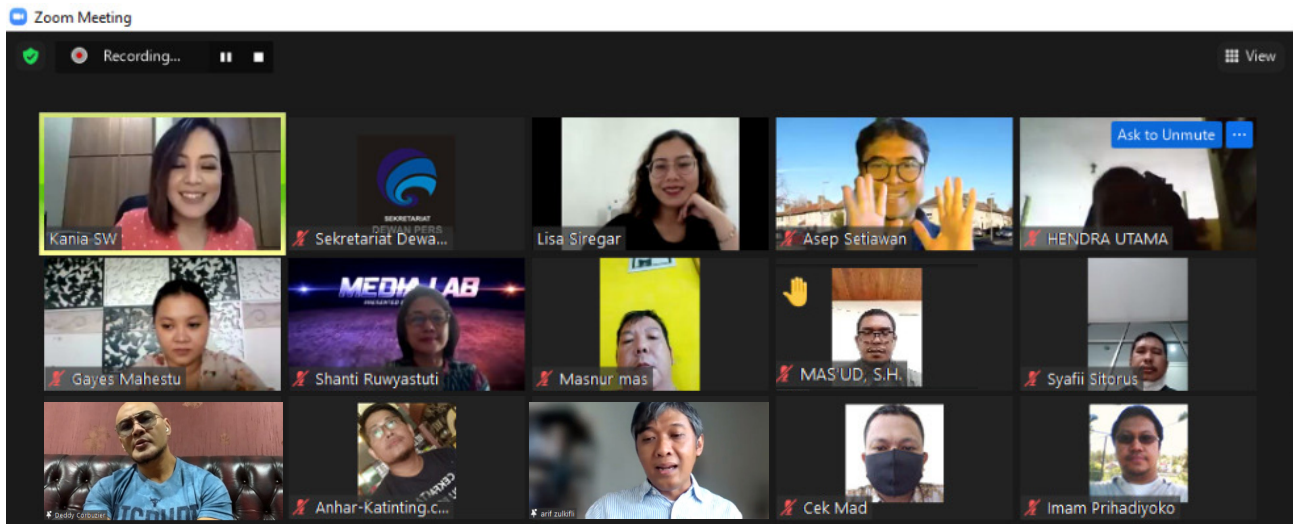
Menanggapi hal itu, Arif menjelaskan, “Media mainstream nggak selalu benar, bahkan ada 400 - 800 pengaduan masuk ke Dewan Pers terkait kasus hukum pers. Pro-


duk mirip jurnalistik yang diproduksi konten kreator yang sudah mulai bagus dan banyak penonton ini belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena tidak termasuk dalam ranah UU Pers,” ungkap Arif Zulkifli.

SARAN INFORMASI

Sementara itu Lisa Siregar selaku Pemimpin Redaksi Asumsi menjelaskan, “Asumsi ini adalah media siber alternatif tentang *current affairs* sejak 2015 berawal dari channel YouTube lalu kemudian muncul turunannya ada artikel, podcast dan media sosial. Kemasan berita kami berbeda sajian dengan media arus utama.”

Dikutip dari laman *asumsi.co*, Asumsi adalah institusi media yang berfokus pada bahasan politik dan budaya pop. Didirikan oleh Pangeran Siahaan pada tahun 2015. Asumsi berawal dari sebuah channel YouTube



 NARA SUMBER DAN PESERTA MEDIA LAB. (FOTO:DEWAN PERS)

yang aktif membahas berbagai isu terkini dan juga mewawancarai sejumlah tokoh.

Seiring perkembangannya, liputan dari awak redaksi pun dikemas dalam berbagai format, mulai dari video, artikel, podcast, newsletter, hingga media sosial. Hingga kini, sejumlah inovasi dalam melakukan tugas jurnalistik terus dilakukan oleh Asumsi. Asumsi percaya dengan peran media massa sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dalam pembuatan konten kami sangat menjaga proses etika kerja jurnalistik mulai dari *planning*, riset, penentuan narasumber hingga wawancara dalam bentuk video. Kita mengemasnya harus bisa informatif, edukatif, menghibur sekaligus sebagai kontrol sosial, dan ternyata tidak semua orang senang dengan yang kita sajikan,” ungkap Lisa.

Lisa menceritakan pada sebuah episode yang mengungkap tentang suatu daerah yang penuh dengan stigma kriminal mendapat perlawanan dan intimidasi dari sebagian warga. Ada hal yang menjadikan tantangan

untuk media bisa bertahan yakni tentang mempertahankan etika dan bisnis.

SOLUSI DI ERA DISRUPSI

Dalam diskusi ini, pemimpin Redaksi Narasi, Zen Rahmat Sugito, menceritakan bagaimana mereka mencari solusi dalam bertahan hidup di era disrupsi media. “Narasi dirintis sejak 2018 oleh Najwa Shihab, salah satu program unggulannya yakni program Mata Najwa. Ada dua kluster utama di narasi.tv yakni konten news room dan konten experience,” ungkap Zen RS kepada Media Lab saat diwawancarai Kania. Masyarakat telah banyak mengenal tentang konten yang disajikan oleh *narasi.tv*. Mereka bisa menyaksikan konten melalui berbagai saluran yakni melalui mainstream media maupun media sosial.

“Semangat narasi cenderung *homeless* walaupun punya rumah website narasi.tv namun ini adalah bagian dari semangat adaptasi. Nggak penting orang nonton dari platform manapun yang penting mereka tahu itu adalah produk dari kami,” ujar Zen RS membuka paparannya.


Dikutip dari laman narasi dot tv, Narasi adalah ruang bagi kita bersama untuk bertukar ide dan beradu gagasan. Berkiblat pada idealisme serta nilai-nilai kemajemukan, kritis dan toleran, serta mendorong setiap anak bangsa agar suka rela menggagas peran. Sebab setiap zaman menorehkan ceritanya sendiri.

“Pers bisa dibaca sebagai dua pendekatan yakni pers sebagai lembaga publik yang dilindungi oleh UU Pers sehingga istimewa tidak bisa dipidanakan karena tugas jurnalistiknya. Namun, disisi lain pers juga sebagai institusi bisnis sehingga perlu cara untuk bisa bertahan,” ungkap Zen.

Acara Dewan Pers ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting dengan empat narasumber yakni Deddy Corbuzier sebagai Naravlog/ Kreator Siniar, Zen Rahmat Sugito sebagai Pemimpin Redaksi Narasi, Lisa Siregar selaku Pemimpin Redaksi Asumsi dan Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Arif Zulkifli. Dialog ini dipandu oleh moderator Kania Sutisnawinata yang juga sebagai CEO Medcom.id. • (Imam Suwandi)

PENGUMPULAN DATA UNTUK IKP 2021 DI AMBON



 FGD DI AMBON, PROVINSI MALUKU.
(FOTO:DEWAN PERS)

Salah satu kegiatan dari Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021 adalah melakukan pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD). Dewan Pers bersama lembaga Sucofindo sejak awal tahun memproses pengumpulan data ini secara serius termasuk yang berlangsung sekitar dua minggu sebelum Idul Fitri tahun 2021. FGD itu dilakukan di Ambon, Provinsi Maluku.

Para nara sumber untuk FGD ini adalah informan ahli yang pernah diwawancara melalui kuesioner mulai dari para praktisi media, akademisi sampai dengan pejabat pemerintah. Di dalam kuesioner ini terdapat

lingkungan fisik-politik, lingkungan ekonomi dan hukum. Kemudian dari tiga lingkungan ini diuraikan sekitar 20 indikator yang kemudian menjadi 80 pernyataan yang harus diisi oleh para informan ahli ini. Dengan pengisian kuesioner itulah maka didapat data mengenai Indeks Kemerdekaan Provinsi Maluku.

Sebagia bagian dari metode survei kemudian para informan ahli yang rata-rata jumlahnya masing-masing 12 orang di 3 Provinsi termasuk di Maluku, dikumpulkan untuk mendapatkan informasi lebih dalam berbagai skor yang telah dituangkan dalam kuesioner. Metode FGD ini menggali sejumlah data yang ada di dalam kuesioner mengenai Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku. Karena pentingnya pandangan dan penilaian dari informan ahli ini, FGD biasanya berlangsung total lima jam dengan ditutup buka bersama karena masih dalam suasana Ramadhan.

FGD seperti dilaksanakan di Ambon ini berlangsung di 33 provinsi lainnya sehingga Indeks Kemerdekaan Pers ini dapat terkumpul dengan baik. Hasil FGD ini kemudian menjadi bahan analisis IKP 2021 di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat nasional di adakan *National Assessment Council* (NAC) yang memberikan penilaian IKP secara nasional. Dari hasil NAC inilah kemudian digabung dengan hasil IKP Provinsi maka akan dapat nilai IKP 2021 secara nasional. ● (Redaksi Bulletin Etika)

Metode FGD ini menggali sejumlah data yang ada di dalam kuesioner mengenai Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku.

MENINGKATKAN KUALITAS KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan peningkatan kualitas Kemerdekaan Pers merupakan salah satu agenda utama Dewan Pers. Kemerdekaan Pers itu sendiri kata kuncinya adalah kompetensi wartawan sehingga perlu peningkatan Uji Kompetensi Wartawan. Dewan Pers juga menghendaki adanya transformasi digital dalam pelayanan pers kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Mohammad Nuh dalam rapat kerja Dewan Pers di Tangerang 25 April 2021 yang dihadiri anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli, Sekretariat dan sejumlah undangan.

Uji Kompetensi Wartawan adalah salah satu perangkat dalam memperkuat profesionalisme wartawan yang

nantinya ikut mengembangkan kualitas Kemerdekaan Pers.

Terkait dengan UKW ini, pembauran perlu dilakukan terus menerus baik dalam konten maupun konteks materi pelatihan. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah literasi digital karena perkembangan saat ini sudah mengarah ke platform digital. Dalam pelaksanaannya, lembaga UKW menjadi sentral dari penguatan kompetensi wartawan karena Dewan Pers telah mendelegasikannya kepada mereka. Lembaga UKW saat ini jumlahnya mencapai 29 lembaga.

Selain meluluskan wartawan sampai jumlahnya belasan ribu orang, yang penting juga dilihat adalah seberapa besar dampak terhadap peningkatan pers di Indonesia. Oleh sebab itulah maka ke depan perlu ada

alat ukur mengenai dampak UKW ini, tidak hanya sekedar jumlahnya.

Mohammad Nuh mengibaratkan “output” dengan dampak itu seperti orang membangun jembatan. Jika ukuran jembatan sudah ditentukan dan lokasi pembangunan sudah ditentukan, sebenarnya sudah selesai program membangun jembatan itu. Namun jika lokasi jembatan itu jarang dilalui manusia karena jauh dari perkampungan maka dampaknya kecil. Berbeda jika jembatan itu dibangun di lokasi yang sering dilalui manusia maka dampak jembatan itu akan sangat dirasakan manfaatnya.

Saatnya Dewan Pers mengukur dampak dari jumlah wartawan yang lulus kompetensi. Dampak itu bisa diukur misalnya dari kualitas penyiaran, kualitas produk jurnalistik dan



RAPAT KERJA DEWAN PERS YANG DIHADIRI ANGGOTA DEWAN PERS, TENAGA AHLI, SEKRETARIAT DAN SEJUMLAH UNDANGAN.
(FOTO:DEWAN PERS)

juga aspek lain seperti jumlah pengaduan produk pers ke Dewan Pers. Jika pengaduan semakin besar jumlahnya maka bisa jadi bertambahnya jumlah wartawan yang kompeten tidak memberikan dampak kepada kualitas pers.

Dewan Pers mendorong adanya kajian mengenai dampak UKW terhadap kualitas pers di Indonesia. Oleh karena itu nanti dapat dilihat apakah bertambahnya wartawan yang kompeten akan memberikan dampak positif terhadap kemerdekaan pers di Indonesia serta dampak lainnya.

Selain perlunya penguatan lembaga UKW dan mengukur dampak jurnalis yang kompeten terhadap pers, Dewan Pers juga mendorong adanya transformasi digital dalam pelayanan bagi komunitas pers dan masyarakat. Transformasi digital ini “baik dari sisi layanan kita terhadap bisnis proses yang ada di dalam Dewan Pers dan

“baik dari sisi layanan kita terhadap bisnis proses yang ada di dalam Dewan Pers dan seterusnya, itu harus kita digitalisasi dan tidak hanya di situ saja tetapi juga aspek-aspek hal yang lain yang terkait dengan transformasi digital termasuk perubahan kultur dan seterusnya.”

seterusnya, itu harus kita digitalisasi dan tidak hanya di situ saja tetapi juga aspek-aspek hal yang lain yang terkait dengan transformasi digital termasuk perubahan kultur dan seterusnya,” jelas M. Nuh.

Selain pelayanan, Ketua Dewan Pers juga berharap disiapkan panduan kompetensi wartawan termasuk di dalamnya kurikulum UKW yang terus diperbarui. Selain materi uji kompetensi yang perlu diperbaiki juga metodenya yang menyangkut bagaimana mengajarkannya dan bagaimana mengevaluasinya. Termasuk dalam metodologi pelatihan ini perlunya model hybrid yakni “kombinasi antara yang konvensional yang harus tatap muka itu dengan memanfaatkan ruang cyber”. Diharapkan dengan model hibrid ini maka peserta tidak dibatasi hanya 50 orang saja namun bisa dinaikkan jumlahnya. ● (Redaksi Etika)

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN APRIL 2021

- Risalah No 37**
Mimihetty Layani dengan potretsatu.com
- Risalah No 38**
PT. BRI & PT. Bringin Gigantara dengan inilah.com
- Risalah No 39**
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan bizlaw.id
- Risalah No 40**
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan teropongsenayan.com
- Risalah No 41**
PT. Bringin Gigantara dengan rri.co.id
- Risalah No 42**
PT. Bringin Gigantara dengan beritabuana.co
- Risalah No 43**
PT. Bringin Gigantara dengan fin.co.id
- Risalah No 44**
PT. Bringin Gigantara dengan lampuhijau.co.id
- Risalah No 45**
Mimihetty Layani dengan newsmetropol.com
- Risalah No 46**
Mimihetty Layani dengan nusantara-news.co
- Risalah No 47**
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan suaramerdeka.jkt.com
- Risalah No 48**
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan nusantarapos.co.id
- Risalah No 49**
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan senator.id
- Risalah No 50**
PT. BRI dan PT. Bringin Gigantara dengan cipasera.com
- Risalah No 51**
Ridwan Badallah dengan telisik.id
- Risalah No 52**
Helda dengan balitribune.co.id
- Risalah No 53**
Helda dengan patrolipost.com

DATA PENGADUAN
Januari - Mei 2021

398
Pengaduan Masuk

189
Pengaduan Terselesaikan

209
Pengaduan Belum Terselesaikan

47%
Prosentase Pengaduan Terselesaikan

PPR: 1 PPR

PPR No 10 terhadap tribunrakyat.com atas pengaduan Rachmat Sukarno

PPR: 1 PPR

PPR No 11 terhadap koran.tempo.co atas pengaduan BBHAR Pusat PDIP

PPR: 1 PPR

PPR No 9 terhadap Majalah Media Hindu atas pengaduan Arya Wedakarna

PPR: 1 PPR

PPR No 12 terhadap faktanews.com atas pengaduan Haris S



HASIL UKW (JANUARI - MEI 2021)		
PESERTA	LOLOS	PRESENTASE
1049	994	95%

GRAFIK DEWAN PERS

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN MEI 2021

**PERUSAHAAN TERVERIFIKASI FAKTUAL
JANUARI-MEI 2021: 114 PERUSAHAAN**

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	2	0	0	19	21
Terverifikasi Administratif	1	0	2	18	21
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI	STATUS	APPROVAL
1	Harian Mistar	Cetak	Sumatera Utara	Terverifikasi Administratif	5/1/2021
2	Satelit News	Cetak	Banten	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
3	Majalah Tempo	Cetak	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
4	viralsumsel.com	Siber	Sumatera Selatan	Terverifikasi Administratif	5/30/2021
5	Ritmee.co.id	Siber	Sulawesi Selatan	Terverifikasi Administratif	5/30/2021
6	seru.co.id	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif	5/30/2021
7	datakepri.com	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif	5/25/2021
8	indomen.co.id	Siber	Sumatera Barat	Terverifikasi Administratif	5/25/2021
9	sentralberita.com	Siber	Sumatera Utara	Terverifikasi Administratif	5/25/2021
10	teraskata.com	Siber	Sulawesi Selatan	Terverifikasi Administratif	5/25/2021
11	fornews.co	Siber	Sumatera Selatan	Terverifikasi Administratif	5/21/2021
12	enimekspres.co.id	Siber	Sumatera Selatan	Terverifikasi Administratif	5/21/2021
13	suarasumsel.net	Siber	Sumatera Selatan	Terverifikasi Administratif	5/21/2021
14	Ikilhojatim.com	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
15	Mediakaltim.com	Siber	Kalimantan Timur	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
16	gerbangindonesia.co.id	Siber	Nusa Tenggara Barat	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
17	Intimnews.com	Siber	Kalimantan Tengah	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
18	Komentaren.net	Siber	Sulawesi Utara	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
19	Parepos.co.id	Siber	Sulawesi Selatan	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
20	monitorindonesia.com	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
21	tangselpos.id	Siber	Banten	Terverifikasi Administratif	5/17/2021
22	sentralnews.com	Siber	Bengkulu	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
23	owntalk.co.id	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
24	kepriglobal.com	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
25	acehbisnis.com	Siber	Aceh	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
26	anteroaceh.com	Siber	Aceh	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
27	metropolis.id	Siber	Aceh	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
28	Suarabatam.com	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
29	beritamerdeka.net	Siber	Aceh	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
30	infosatu.co	Siber	Kalimantan Timur	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
31	InsitekalTIM.com	Siber	Kalimantan Timur	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
32	radarmadiun.co.id	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/30/2021
33	silabuskepri.co.id	Siber	Kepulauan Riau	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/19/2021
34	global-news.co.id	Siber	Jawa Timur	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/19/2021
35	rakyatsulsul.co	Siber	Sulawesi Selatan	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/19/2021
36	fajar.co.id	Siber	Sulawesi Selatan	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
37	Bizlaw.Id	Siber	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
38	Dailypost.id	Siber	Gorontalo	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
39	newsnesia.id	Siber	Gorontalo	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
40	readtimes.id	Siber	Sulawesi Selatan	Terverifikasi Administratif dan Faktual	5/18/2021
41	CNBC Indonesia	Televisi	DKI Jakarta	Terverifikasi Administratif	5/30/2021
42	Efarina Televisi	Televisi	Sumatera Utara	Terverifikasi Administratif	2021



ANGGOTA Dewan Pers, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers Asep Setiawan membuka Focus Group Discussion (FGD) Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 pada Rabu (5/5) di Kota Ambon, Maluku. Acara dihadiri 10 informan ahli. ●





WAKIL Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun membuka Focus Group Discussion (FGD) Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 pada Selasa (4/5) di Hotel Harper Makassar, Sulawesi Selatan. Acara dihadiri 7 informan ahli dan 2 informan ahli secara daring. ●

